

Pengaruh Rencana APBD dan Realisasi APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)

Irna Roseniati¹ Anisa Sains Kharisma² Roni³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi,
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email: irna91220@gmail.com¹ anisasains08@gmail.com² roni.umus18@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Rencana APBD, realisasi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes. Penelitian ini mengambil studi empiris di Kabupaten Brebes pada periode 2018-2023. Hal ini berkaitan dengan suatu rencana dan realisasi tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses siklus APBD yang akan mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah sehingga dalam penggunaan sesuai dengan kebutuhan kesejahteraan dan ketentuan yang telah ada. Dengan adanya APBD diharapkan agar mampu meningkatkan pendapatan yang akan mempengaruhi PDRB yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Populasi yang digunakan adalah laporan realisasi APBD Kabupaten Brebes pada tahun 2018 sampai 2022 dengan teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling* yang terdapat pada laporan realisasi APBD yang berkaitan dengan laporan pendapatan dan belanja. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil LRA dan PDRB. Analisis statistika data menggunakan program SPSS dengan alat analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial rencana APBD dan realisasi APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hasil rencana APBD t hitung $2,068 < t$ tabel $4,302$, dan realisasi APBD t hitung $-1,988 < t$ tabel $-4,302$, dengan derajat dengan derajat $\alpha = 0,025$. Dan untuk secara simultan tidak berpengaruh dengan hasil analisis F hitung $2,420 < F$ tabel $10,13$. Sehingga secara parsial rencana APBD berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, realisasi APBD berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan secara simultan rencana APBD dan realisasi APBD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Rencana APBD, Realisasi APBD dan Pertumbuhan Ekonomi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemerintahan ialah lembaga nirbala yang mempunyai kekuasaan dan hak dalam mengatur keinginan serta kebutuhan diperlukan rakyat dengan aturan dan persetujuan pemerintahan namun tidak mencari keuntungan melainkan memnuhi kebutuhan rakyat sesuai dalam PP No. 12 Tahun 2019 Atas Perubahan PP RI No. 58 Tahun 2005. Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan pada sistem terpadu yang dilaksanakan APBD yang ditentukan PERDA (Putri & Munandar, 2021). Terdapat peraturan menteri meliputi kewenangan pengelolaan keuangan daerah, asa dan susunan umum, penyusunan dan penetapan, pelaksanaan, perubahan, pengelolaan kas, pengelolaan keuangan daerah, tanggung jawab pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, kerugian dan pengelolaan keuangan Badan Layana Umum Daerah (BLUD) (Ali et al., 2017). Keuangan daerah yaitu hak dan kewajiban daerah untuk menambahkan sumber pendapatan daerah berasal bebrapa sumber, serta diwujudkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Manimbaga et al., 2021). APBD adalah peran penting acuan perencanaan penerimaan dan pengeluaran perperiode (Ihalauw et al., 2023).

Peraturan perundang-undang dibentuk dewan perwakilan daerah provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah yang disampaikan pada UU No 15 Tahun 2019 sebagai wujud nyata dijadikan sebagai saran komunikasi pemerintahan berbentuk anggaran sebagai pencapaian, implementasi dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) termasuk dalam APBD yang di sinkronisasikan dengan kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pemerintahan pusat berkaitan dengan sasaran dan target penyusunan RKPD guna mendukung visi dan misi Negara.

Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 struktur APBD antara lain pendapatan, belanja dan pembiayaan, dalam pengelolaannya dengan perencanaan dan realisasi anggaran dengan penatausaha dan bukti laporan pertanggung jawaban dengan Laporan realisasi anggaran (LRA) dan sesuai pada keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2012 dan pada peraturan menteri dalam Negeri RI No. 84 Tahun 2022 dalam pedoman penyusunan. Pemerintahan daerah yaitu sebuah unsur penyelenggara dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). APBD bertujuan menormalkan ekonomi daerah, menambahkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan dalam menarik investor untuk penanaman modal (H. Rahmawati, 2023). Rencana anggaran terlaksana dengan baik menimbulkan ketertarikannya investor sehingga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan dan membantu meningkatnya kapasitas produksi atau jasa yang diharapkan untuk menghasilkan keluaran dan nilai tambah dalam perekonomian (Fryda Lucyani, 2022).

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi penambahan pendapatan dengan produksi barang dan jasa oleh majunya teknologi menunjukan berkembang tidaknya ekonomi serta menentukan kesejahteraan masyarakat ditunjukannya perubahan output barang atau jasa produksi rakyat bertambah (Lova, 2022). Dapat dihitung memakai indikator Gross Domestic Product (GDP) atau disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan nilai kontanta dengan membandingkan satu period ke periode sebelumnya. Dapat kita lihat Nilai PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) dari tahun 2018 sampai 2022 antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstanta Menurut Lapangan Usaha tahun 2017-2022

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstanta
2017	Rp 39.963.111.450	Rp29.509.206.810
2018	Rp 42.973.395.360	Rp 31.060.106.120
2019	Rp 46.178.657.580	Rp 32.847.862.670
2020	Rp 47.058.595.600	Rp 32.693.080.650
2021	Rp 48.966.236.570	Rp 33.456.328.430
2022	Rp 53.771.057.500	Rp 35.414.759.350
Total	Rp 278.911.054.060	Rp 194.981.344.030

Sumber: Olah data BPS, 2023

Dari table 1, nilai tertinggi terdapat pada tahun 2022 sebesar nilai harga berlaku Rp 53.771.057.500 serta harga konstanta Rp 35.414.759.350 . Dari hal tersebut menunjukan berdasarkan kemampuan sumber daya ekonomi dihasilkan baik, dilihat dari penggunaannya menunjukan produk barang dan jasa untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan pihak luar. Sedangkan harga konstanta menunjukan laju ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor serta dijadikan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes (BPS, 2023).

Berdasarkan *research gap* oleh penelitian S. Reski (2020) berjudul “Pengaruh APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Soppeng” bahwa apabila terjadi peningkatan

pada nilai APBD belum tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu APBD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Lamaya & Mei (2021) berjudul “Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Flores Timur” bahwa Pendapatan dan Belanja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan. Serta Penelitian Aco (2018) berjudul “Pengaruh Realisasi APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” menyimpulkan pendapatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja tidak berpengaruh.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut peneliti mengadakan suatu penelitian berjudul “Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)” dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh rencana dan realisasi APBD secara parsial maupun simultan terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengetahui terjadinya timbal balik pemerintahan daerah dan masyarakat.

Kajian Literatur

Teori Legitimasi

Teori yang digunakan bidang akuntansi sosial/lingkungan dengan menjelaskan pengungkapan tanggung jawab (Badjuri et al., 2021). Legitimacy Theory berfokuskan terhadap interaksi keberlangsungan pemerintahan tergantung hubungan masyarakat dan lingkungan wilayah (Yoehana, 2018). Hal ini berkaitan menyesuaikan perundang-undangan dan kebutuhan yang sesuai pada masyarakat dengan adanya timbal balik APBD pada pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan (Saleh et al., 2021). Asas terletak menjadi dasar atas tindakan pemerintah terhadap jaminan perlindungan hak rakyat dan sebagai prinsip utama negara hukum sesuai UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Agustiwi & Surakarta, 2022).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

PP RI No. 71 Tahun 2010 Pasal A Ayat (3), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi diterapkan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintahan (BPK, 2010). Berdasarkan Pemendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (3) kebijakan accounting berlaku guna menyiapkan serta menyajikan laporan keuangan publik yang mempunyai peraturan mendukung bobot pelaporan menggunakan prinsip akuntansi diatur dan ditetapkan entitasnya (Sengkey et al., 2022). Dalam menyusun menggunakan pedoman Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 4, Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 6 Ayat 1, mengatur penyusunan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan SAP (Irmawani et al., 2022). Sebuah standar yang berlaku umum diaturan dan ditentukan entitas dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBN/APBD sehingga memberikan laporan yang berkualitas serta dipertanggungjawabkan (Siahaan & Simanjuntak, 2020). Terdapat karakteristik kualitatif: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Pura, 2021). dan Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 Pasal 6 Ayat 1 mengatur penyusunan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan SAP yang dibagi berbasis Akrua sesuai Pemendagri No. 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat, dan basis kas sesuai Pemendagri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Pasal 1 Ayat 8, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah disetujui oleh DPR, dan terdapat pada UU No. 9 Tahun 2020 Pasal 1, UU No.12 Tahun 2019 pasal 1. APBD ialah spek penting pelaksanaa

otonomi berkaitan dalam keuangan dengan persetujuan DPR dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan sarana bagi pemegang kepentingan untuk melihat/mengetahui kemampuan pada pendapatan dan pengeluaran, dimana pendapatan dan perkembangan APBD sebagai perencanaan jangka pendek (Hafizah, 2022). Selisih lebih atau kurang antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja mengakibatkan surplus atau defisit APBD (R. Rahmawati, 2023).

Fungsi APBD terdapat pada Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: Fungsi otorisasi, Fungsi perencanaan, Fungsi pengawasan, Fungsi alokasi, Fungsi distribusi, dan Fungsi stabilisasi. Menurut PP No. 12 Tahun 2019 siklus APBD diawali dengan beberapa tahap, antara lain: Perencanaan/penyusunan dan penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, dan Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dengan waktu sekitar 2,5 tahun ditetapkan oleh PERDA bahwa RAPBD diajukan serta disetujui oleh DPRD yang disepakati eksekutif dan legislatif dan diajukan kepada gubernur untuk dievaluasi (Hartandi, 2022). Jika diajukan DPRD tidak disetujui harus tetap dilaksanakan menggunakan peraturan bupati/walikota dengan konsekuensi pengeluaran yang dapat dibayarkan dalam tahun anggaran tersebut dengan maksimal sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dipakai (Efriza & Tri Rachmanto Supena, 2021).

Penyusunan ini berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) APBD, perubahan dan pertanggungjawaban terealisasi pertahun ditetapkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan dengan penerimaan dan pengeluaran berbentuk uang yang dianggarkan (Tanjung et al., 2023). Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Atas perubahan tentang pengelolaan keuangan daerah, struktur terdiri dari (Hukum et al., 2019): Penerimaan/pendapatan daerah, Belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Hal ini dijadikan untuk mengukur kinerja dsalam menilai keberhasilan/kegagalan realisasi ditetapkan pada rencana strategis dan rencana kinerja tahunan didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran presentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah, semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin baik, dapat dilihat sebagai berikut (Badan Keuangan Dan Aset Daerah, 2020):

Tabel 2. Skala Nilai Peringkat Kinerja APBD

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≥	Sangat Tinggi
2.	76% ≥ 90%	Tinggi
3.	66% ≥ 75%	Sedang
4.	51% ≥ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Laporan Keuangan Pemerintahan

Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 Ayat 1, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode dan Pemerintah Pasal 5 Ayat 1, Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah setidaknya-tidaknya terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan (Peraturan Pemerintah, 2006). Bertujuan dalam gambaran hasil kinerja pencapaian atas proses penggunaan dengan bentuk biaya serta pendapatan yang diterima pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, sumbangan, dan dana dari perimbangan pemerintah pusat guna bahan informasi untuk mengambil keputusan bagi pihak kepentingan (Panggabean, 2019). Laporan yang baik disajikan secara

wajar dan sesuai standar akuntansi berlaku sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dari segi material yang disajikan secara wajar. Dalam menyusun serta menyajikannya guna bertanggungjawab kepada rakyat serta pihak internal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan eksternal guna membuat kebijakan ekonomi, sosial, dan politik (Hidayat et al., 2021). Sehingga harus ditepat waktu dan *reliable* yang dilengkapi pengungkapan informasi keuangan independen (Malumperas et al., 2021).

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

RAPBD salah siklus awal terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Atas Perubahan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Iqbal et al., (2021), Perencanaan merupakan penyusunan menentukan tujuan dalam entitas yang memberikan keterangan strategis kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Penyusunan pelayanan dapat digunakan untuk menentukan arah lembaga secara keseluruhan. Menurut Wance (2019), bahwa sebagai suatu rencana yang dijadwalkan secara sistematis meliputi semua kegiatan pemerintah yang disebut dengan unit (kesatuan) moneter serta digunakan dalam periode teretntu pada waktu yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa rencana APBD digunakan menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan kegiatan selama periode berlaku menggunakan pedoman yang telah ada. Dan dijadikan gambaran kegiatan maupun kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya maupun penentua anggaran (Yuliyah & Ardini, 2022).

PEMENDAGRI No. 84 Tahun 2022, Pedoman Penyusunan APBD Pasal 2, Ruang lingkup Pedoman Penyusunan meliputi: Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pusat, prinsip penyusunan, kebijakan penyusunan, dan Teknis penyusunan dan hal khusus lainnya. Struktur APBD meurut Azifi & Marliyah (2022), anatar lain: Perolehan pendapatan daerah, Belanja daerah, Pembiayaan sumber, dan Proses penetapan APBD. RAPBD dilaksanakan selambat-lambatnmya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Realisasi adalah tindakan dalam mencapai sesuatu direncanakan/diharapkan. Menurut SAP Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dalam Peraturan SAP No 24, "LRA yaitu komponen laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi realisasi dan APBD entitas pelaporan secara tersanding untuk periode tertentu". Serta prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, serta wajib disusun karena akan mengetahui pendapatan atau belanja yang diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan mengalami penambahan atau pengurangan kas yang disajikan secara wajar (BPK, 2010). Menurut Iqbal et al., (2021), realisasi APBD atau LRA adalah laporan menyajikan ikhtisari sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dikelola pemerintahan pusat atau daerah menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu pelaporan.

Unsur yang terdapat yaitu menyajikan informasi mengenai laporan pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan sesuai dengan rencana APBD. Sehingga disimpulkan laporan realisasi anggaran yaitu laporan yang memuat anggaran dan realisasi yang digunakan memberikan *feedback serta follow up* agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi. Majampoh & Datu (2021), LR-APBD bermanfaat bagi masyarakat dan penggunaanya dalam mendapatkan informasi menyeluruh mengenai realisasi, alokasi anggaran instansi, serta menjadi dasar pengevaluasian kinerja yang dilakukan entitas pelaporan atas dilaksanakan sesuai sumber daya ekonomi, serta bertujuan menetapkan dasar-dasar penyajian LRA dalam pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas yang disajikan sekurang-kurangnya sekali pertahun (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*)

Yuniarti et al., (2020), merupakan peningkatan kapasitas ditentukan adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologi dalam jangka panjang daerah terhubung untuk tuntutan dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Faktor dengan kondisi dimana nilai ril PDRB atau Gross Domestic Product (GDP), mengalami peningkatan disebabkan tersedianya sejumlah sumber dan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi (Simanungkalit, 2020). Menurut Salim (2021), suatu proses kenaikan output perkapita terus menerus dengan jangka panjang harus dilakukan daerah. Hal ini dijadikan penyebab sehat tidaknya perekonomian daerah serta sebagai syarat mutlak memajukan dan mensejahterakan daerah. Dimana daerah tidak dapat meningkatkannya yang menimbulkan masalah ekonomi dan sosial berupa tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi. Menurut Safitri et al., (2020), suatu perubahan situasi ekonomi negara serta sebagai faktor berpengaruh terhadap pertumbuhan jangka panjang dalam produksi perkapita sehingga membentuk proses pertumbuhan sebagai indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara nyata. Disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu daerah dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.

Menurut Purba (2020), dilihat dari PDRB/GDP atas dasar harga konstan, sebagai pertambahan riil barang dan jasa dihasilkan wilayah, perekonomian dikatakan tumbuh dan berkembang bila hal itu terjadi. Menurut BPS RI (2021) pada penelitian (Fryda Lucyani, 2022), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah nilai tambah dihasilkan seluruh unit usaha dalam negara, atau nilai akhir barang dan jasa dihasilkan seluruh unit ekonomi. Menurut Regina (2022), Alasan PDRB sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut: dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian, PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran (*circulair flow concept*) yaitu perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup perhitungan pada periode sebelumnya. Dan atas wilayah perhitungan PDB adalah Negara (perekonomian domestik). Jadi, PDRB ialah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas *output* barang dan jasa dalam periode tertentu sehingga mencerminkan kinerja ekonomi, dapat dikatakan semakin tinggi nilai PDB maka semakin bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut. Karena begitu pentingnya peran PDB di dalam perekonomian.

Menurut S. Reski, (2020) Terdapat ciri-cirinya anatara lain: ¹Terjadi laju pertumbuhan penduduk serta produk perkapita yang cepat, ²meningkatnya produktivitas masyarakat, ³Adanya perubahan struktural yang signifikan, ⁴Terjadinya urbanisasi dalam suatu negara, ⁵Melakukan ekspansi ke negara maju dan terjadinya arus barang, modal, dan juga manusia antar bangsa-bangsa atau antar negara di dunia. Factor penting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu ¹Kekayaan sumber alam dan tanahnya, ²Jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, ³Tingkat teknologi yang digunakan dan ⁴sistem sosial dan sikap masyarakat.

Pengembangan Hipotesis:

1. Pengaruh Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

RAPBD, siklus awal APBD pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dijadikan pedoman dalam taktis, strategi serta gambaran kinerja keuangan untuk menjalankan

pemerintahan dan menaksirkan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan tersedia sehingga dilakukan secara akurat (Yuliyah & Ardini, 2022). Sedangkan pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan daerah adanya pertumbuhan tunjukkan perubahan *output* nasional perekonomian menyebabkan barang atau jasa diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran rakyat meningkat. Pertumbuhan menunjukkan sejauh mana perekonomian daerah menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat satu periode tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Lova, 2022). Suatu pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh pendapatan daerah baik yang diperoleh oleh masyarakat maupun pemerintahan. Sehingga dalam suatu perencanaan APBD dilakukan dengan baik dan semaksimal mungkin terhadap pendapatan daerah. Dana anggaran diolah untuk memberdayakan sumber daya manusia dengan adanya suatu program yang membutuhkan tenaga kerja masyarakat sehingga terjadi timbal balik yang baik oleh pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu dengan faktor peningkatan pendapatan masyarakat satu periode.

Menurut Nasution & Harahap (2020), perencanaan maupun Pelaksanaan Anggaran memiliki pengaruh secara parsial terhadap realisasi APBD. Sedangkan menurut Iqbal et al., (2021), secara simultan rencana anggaran dan realisasi APBD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dari urain diatas bahwa hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini yaitu:

H1: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi APBD, gambaran pencapaian pelaksanaan APBD yang telah diharapkan dan direncanakan. Menurut Majampoh & Datu (2021), bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan memuat tentang anggaran dan realisasi yang dapat digunakan untuk memberikan *feedback* serta *follow up* agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi dan digunakan mendapatkan informasi menyeluruh dan bertujuan menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi, proses perubahan perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu atau proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Lamaya & Mei, 2021). Suatu realisasi APBD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dengan terelaisasinya suatu APBD mengetahui perubahan atau tidak. Dimana dengan program terealisasi mampu membuka ketenagaan kerja baru, sehingga meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat daerah

Menurut Lamaya & Mei (2021), bahwa realisasi APBD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil dari penelitian yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dan menurut Nurhidayah & Hendikawati, (2018), bahwa terdapat pengaruh langsung positif PAD dan DAK berpengaruh langsung positif, sedangkan DAU dan Belanja Pembangunan tidak berpengaruh langsung positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tidak terdapat pengaruh langsung positif pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan urain diatas bahwa hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini yaitu:

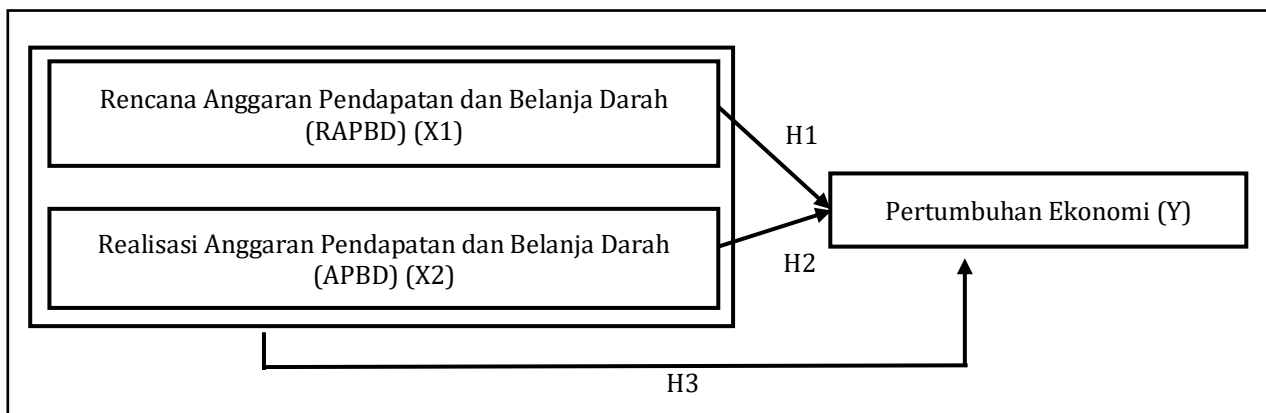
H2: Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

3. Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rencana anggaran dan realisasi APBD, proses yang tidak dapat dipisahkan tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Atas Perubahan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan saling berkaitan (Firmalina et al., 2020). Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan menyediakan berbagai barang dan jasa ekonomi penduduknya ditentukan adanya kemajuan teknologi, *institusional* (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada (Halim, 2020). Sehingga dalam penggunaan APBD harus disesuaikan kebutuhan masyarakat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya memenuhi kebutuhan masyarakat berkaitan bertambahnya pendapatan masyarakat serta ketenagaan kerja masyarakat.

Menurut (S. Reski, 2020), bahwa secara simultan APBD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi. Dengan dana APBD mampu membantu pemerintahan mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya sehingga perlunya kenaikan pendapatan maupun pendapatan masyarakat sendiri sebagai indikator suatu pertumbuhan ekonomi. Maka APBD mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan rencana dan realisasi APBD berpengaruh terhadap pertumbuhan seperti adanya dana pelatihan atau pelayanan masyarakat berpengaruh terhadap pendapatan. Berdasarkan uraian diatas bahwa hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini yaitu:

H3: Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 1. Kerang Berfikir

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif karena data berhubungan dengan angka-angka yang diukur menggunakan statistika sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Ardelia et al., 2022). Jenis data yang digunakan yaitu data skunder yang diambil dari laporan APBD pada Laporan Realisasi APBD (LRA) yang diambil dari BAPERLIBANGDA dan persentase pertumbuhan ekonomi dari BPS Kabupaten Brebes periode 2018-2022 yang diambil dari <https://brebeskab.bps.go.id/> (Siahaan & Simanjuntak, 2020). Variabel independen/variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel lain yang dinamakan variabel dependen, yaitu menggunakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diambil dari target pendapatan dan taerget belanja daerah (Ardelia et al., 2022). Dan variabel dependen/terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel independen/variabel

bebas, besarnya perubahan pada variabel ini tergantung dari variabel independen yang akan memberikan peluang kepada perubahan variabel dependen, yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi (Ulfa, 2019). yang dihitung dengan rumus: Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{PDRB}^1 - \text{PDRB}^{t-1}}{\text{PDRB}^{t-1}} \times 100\%$$

Sumber: Lova, 2022

Metode analisis data merupakan salah satu komponen penting dalam proses *data analysis*, dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (Ariyanti, 2020). Uji penelitian ini yaitu dengan uji statistika deskriptif, uji asumsi klasik: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian uji analisis regresi linear berganda dan Uji hipotesis dengan uji statistika t (parsial) dan uji statistika F(simultan). dan yang terakhir uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Casroni et al., 2022). Perhitungan koefisien regresi linier berganda dilakukan dengan analisis melalui software SPSS 25. Persamaan Regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- α = Nilai Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien Regresi dari variabel independen
- X1 = Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- X2 = Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- e = Tingkat Kesalahan Pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indek pembangunan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi serta dapat diukur dengan pencapaian kinerja keuangan daerah yang dapat dilihat dari rencana dan realisasi APBD yang dapat dilihat dengan presentase (Lova, 2022). APBD digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan strategi dan perencanaan, dengan semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi pencapaian yang dilakukan Kabupaten Brebes (Badan Keuangan Dan Aset Daerah, 2020). Berikut ini skala nilai peringkat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes dari tahun 2018 sampai dengan 2022:

Tabel 3. Skala Nilai Peringkat Kinerja APBD Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022

Tahun	Rencana	Realisasi	Presentase	Keterangan
2018	Rp 5.929.042.083.000,00	Rp 5.679.407.941.365,31	96%	Sangat Tinggi
2019	Rp 6.457.991.031.998,00	Rp 6.229.078.585.728,13	96%	Sangat Tinggi
2020	Rp 5.960.747.180.110,14	Rp 6.193.653.690.298,10	104%	Sangat Tinggi
2021	Rp 6.424.792.820.127,00	Rp 6.288.366.894.888,54	98%	Sangat Tinggi
2022	Rp 6.288.366.894.888,52	Rp 6.207.792.329.597,95	99%	Sangat Tinggi
Total	Rp 31.060.940.010.123,70	Rp 30.598.299.441.878,00	493%	-

Sumber : Olah data BAPERLIBANGDA, 2023

Dari hasil Tabel 3, dari hasil table diatas Kabupaten Brebes mengalami pencapaian kinerja yang sangat bagus dengan interval nilai rata-rata sebesar 97% yaitu dengan nilai diatas 90% yang mempunyai kriteria yang sangat tinggi. Denag Presentase tertinggi pada tahun 2020 sebesar 104% dan terendah pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu sebesar 96%. Namun ditahun 2021 pemerintahan kabupaten mengalami penurunan hasil interval nilai realisasi kinerja sebesar 6% yaitu dengan nilai 98% namun kabupaten mampu meningkatkan sebesar 99% yaitu mengalami peningkatran sebesar 1%. Sedangkan hasil dari olah data nilai PDRB sebagai indikator pertumbuhan daerah pada harga kontanta menghasilkan nilai presentase pertumbuhan ekonomi sebesar:

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2018	5,26%
2019	5,76%
2020	-0,47%
2021	2,33%
2022	5,85%
Total	18,73%

Sumber: Olah data BPS, 2023

Tabel 4, Pertumbuhan ekonomi diatas dilakukan dengan nilai harga konstanta Kabupaten Brebes pada satu periode dan di bandingkan dengan periode sebelumnya dengan rumus yang telah ditentukan sebelumnya (BPS, 2022). Dari nilai PDRB Kabupaten Brebes tahun 2018 sampai tahun 2022, dimana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bahwa mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup positif dengan angka rata-rata pertumbuhan mencapai 4% walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu dengan nilai -0,47%. Namun mampu meningkatkan pertumbuhan ditahun 2021, yaitu sebesar 2,33%. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang mampu menurunkan indek kesehatan maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Hasil Analisis Data dan Pembahasan Uji Statistika Deskriptif

Tabel 5. Hasil Uji Statistika Deskriptif

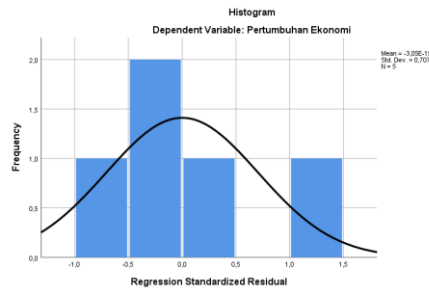
	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rencana APBD	5	5,93	6,46	6,2120	,25193
Realisasi APBD	5	5,68	6,29	6,1200	,24880
Pertumbuhan Ekonomi	5	-,47	5,85	3,7460	2,76383
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

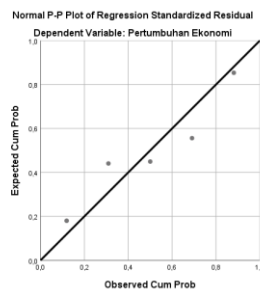
Berdasarkan table 5, hasil uji statistika deskriptif Kabupaten Brebes bahwa variable rencana anggaran dalam nilai triliun rupiah memiliki nilai minimum Rp 5,93, nilai maksimum sebesar Rp 6,46, serta nilai rata-rata sebesar Rp 6,2120. Dan nilai *standard deviation* atau rata-rata penyimpangan nilainya 0,25193. Variabel realisasi memiliki nilai minimum Rp 5,68, nilai maksimum menghasilkan sebesar Rp 6,29, serta nilai rata-rata sebesar Rp 6,1200 dan nilai *standard deviation* atau rata-rata penyimpangan nilainya 0,24880. Dan variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB pada harga konstanta dengan presentase mempunyai nilai minimum -0,47, nilai maksimum menghasilkan sebesar 5,85, serta nilai rata-rata sebesar 3,7460, dan nilai *standard deviation* atau rata-rata penyimpangan nilainya 2,76383.

Uji Asumsi klasik

1. Uji Normalitas, berdasarkan *Propability Plot* dan *One Sampel K-S*:



Gambar 2. Hasil Uji Normal Probabilitu Plot
Sumber: Hasil Penelitian, 2023



Gambar 3. Hasil Uji Normal Probabilitu Plot
Sumber: Hasil penelitian, 2023

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas One Sampel K-S
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
	N	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,70710678
Most Extreme Differences	Absolute	,221
	Positive	,221
	Negative	-,216
Test Statistic		,221
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Berdasarkan gambar 2 dan 3, serta table 6, bahwa bahwa kurva dependen dan rss membentuk gambar seperti lonceng seimbang dan titik-titik persebaran data berada disekitar garis diagonal, dan One Sampel K-S mempunyai nilai *Probability Sig (2 tailed)* 0,200, dimana nilai tersebut dikatakan lebih besar dari 0,05 jadi pengambilan keputusan Hipotesisi Nol (Ho) Data berdistribusi normal, bila Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05. Maka dari dua jenis uji data telah terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018).

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,647	28,224		,023	,984		
1 Rencana APBD	12,183	5,893	1,111	2,068	,175	,507	1,974
Realisasi APBD	-11,860	5,967	-1,068	-1,988	,185	,507	1,974

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Berdasarkan pada table 7, menunjukkan nilai *tolerance* keseluruhan variabel dalam penelitian ini diatas 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, dimana variabel rencana APBD memiliki nilai *tolerance* 0,507 dan nilai VIF 1,974 dan variabel belanja modal memiliki nilai *tolerance* 0,507 dan nilai VIF 1,974. Disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terdapat korelasi atau diantara variabel bebas datanya tidak terkena multikolinearitas (Ghozali, 2018).

3. Uji Autokorelasi

Tabel 8. Hasil Uji Runs Test

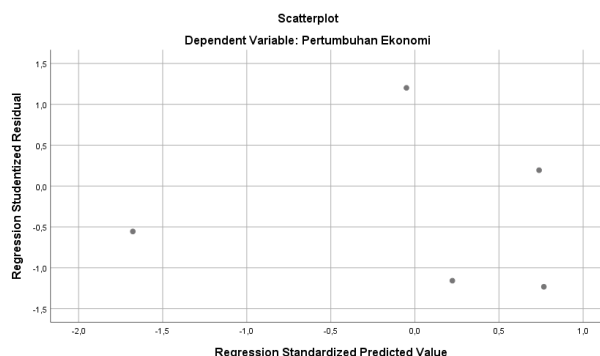
Runs Test	
Test Value ^a	Unstandardized Residual -,26879
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	3
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

a. Median

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Hasil tabel 8, penelitian ini menggunakan tabel runs test yang memakai taraf signifikansi 0,05 atau 5% maka tidak terjadi autokorelasi. Dengan sampel berjumlah 5, dan variabel independen berjumlah 2 (k=2) sehingga sesuai keputusan tidak terjadi gejala autokorelasi, maka keputusan H0 nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > 1,000 maka tidak terjadi gejala autokorelasi positif dengan keputusan ditolak. Sesuai pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi dapat melanjutkan analisis regresi linear (Ghozali, 2018).

4. Uji Heteroskedasitas dengan uji Scatterplot dan uji Glejser



Gambar 4. Hasil Uji Scatterplot
Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Tabel 9. Hasil Heteroskedasitasi Glejser

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-12,847	15,744		-,816	,500		
1 Realisasi APBD	,977	3,328	,248	,294	,797	,507	1,974
Rencana APBD	1,267	3,287	,325	,386	,737	,507	1,974

a. Dependent Variable: ABSResid

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Hasil gambar 4, *scatterplot* diatas titik-titik menyebar secara luas, tidak menyerupai sebuah pola, dimana titik-titik menyebar dibawah angka 0 pada sumbu Y. sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, dan pada table 9, bahwa nilai signifikan Variabel rencana APBD sebesar 0,797 dan signifikan variabel realisasi APBD sebesar 0,737 sehingga data yang digunakan telah memenuhi syarat asumsi klasik untuk dilakukan analisis regresi linear berganda dari kedua variabel mempunyai nilai signifikan > 0,05, tidak terjadi heteroskedasitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,647	28,224		,023	,984
1 Rencana APBD	12,183	5,893	1,111	2,068	,175
Realisasi APBD	-11,860	5,967	-1,068	-1,988	,185

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil penelitian, 2023

Dari hasil table 10, tersusun persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

$$Y = 0,647 + 12,183X_1 - 11,860X_2 + e$$

Nilai konstanta atau keadaan saat variabel pertumbuhan ekonomi belum dipengaruhi variabel lainnya yaitu variabel rencana APBD (X1) dan realisasi APBD (X2) sebesar 0,647. Jika variabel tidak ada maka variabel pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perubahan. Koefisien X1 nilainya 12,183 yang berarti variabel rencana APBD (X1) memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Setiap kenaikan sebesar 1 maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan terjadi perubahan sebesar 12,183 dengan asumsi X2 tetap. Koefisien X2 nilainya -11,860 yang berarti variabel realisasi APBD (X2) memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan sebesar 1 maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan terjadi perubahan sebesar -11,860 dengan asumsi X1 tetap.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan untuk uji statistika t (parsial) dan uji statistika F (simultan) (Ghozali, 2018). hasil dari uji tersebut sebagai berikut:

1. Uji Statistika t (Parsial)

Tabel 11. Hasil Uji Statistia k t (Parsial)

Model		Coefficients ^a			T	Sig.	Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	,647	28,224		,023	,984		
	Rencana APBD	12,183	5,893	1,111	2,068	,175	,507	1,974
	Realisasi APBD	-11,860	5,967	-1,068	-1,988	,185	,507	1,974

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Dari table 11, uji t H1 memperoleh t hitung yang diperoleh untuk variabel rencana APBD (X1) sebesar 2,068 untuk kesalahan 5% uji 2 arah dan $df=5-2-1=2$, maka diperoleh nilai t table 4,302. maka $2,068 < 4,302$, bahwa hipotesis kesatu berpengaruh positif dan signifikan antara rencana APBD terhadap pertumbuhan ekonomi diterima, sejalan dengan penelitian (Nasution & Harahap, 2020), perencanaan maupun Pelaksanaan Anggaran memiliki pengaruh secara parsial terhadap realisasi APBD. Dan penelitian (Iqbal et al., 2021) dengan hasil secara simultan rencana anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Rencana APBD, siklus awal APBD yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 yang dijadikan pedoman pondasi serta gambaran tentang kinerja keuangan untuk menjalankan pemerintahan dan masyarakat dengan menaksirkan taksiran pendapatan dan pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia sehingga anggaran dapat dilakukan secara akurat (Yuliyah & Ardini, 2022). Sehingga dapat mempengaruhi Kabupaten Brebes suatu pendapatan dan belanja daerah dengan pengelolaan rencana yang baik akan menguntungkan Kabupaten Brebes. Kesuksesan pembangunan daerah dengan adanya pertumbuhan ditunjukkan perubahan *output* nasional. Pertumbuhan kabupaten brebes menggambarkan ekonomi Kabupaten Brebes memperoleh tambahan pendapatan masyarakat pada satu periode tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Lova, 2022). Maka sejalan dengan teori kelegitimasi, kegiatan APBD berkaitan pelaksanaan kegiatan dilakukan diantara kegiatan perencanaan dalam menentukan aturan dan kemampuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menambah barang atau jasa dihasilkan rakyat berdampak pada pendapatan besar kemakmuran masyarakat tercapai (Saleh et al., 2021). Dan sesuai UU RI No. 25 Tahun 2009 perihal pelayanan umum bermaksud memberikan ketetapan aturan untuk pihak pengoperasian layanan umum maupun masyarakat serta aparat pengoperasian kewajiban untuk menyediakan layanan serta kesempatan rakyat, sedangkan masyarakat juga berhak tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat negara dalam memberikan pelayanan dan program meningkatkan pendapatan masyarakat (Indonesia, 2009).

Dan uji t H2 pada variable realisasi APBD (X2) menghasilkan adanya pengaruh antara realisasi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat dihitung dengan nilai signifikan t table sebesar -4,302 dan untuk t hitung realisasi APBD (X2) sebesar -1,988, nilai yang diperoleh adalah t hitung $< t$ table yaitu $-1,988 < -4,302$, sehingga dinyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan antara realisasi dan pertumbuhan ekonomi diterima, penelitian sejalan dengan (Lamaya & Mei, 2021) bahwa realisasi secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan belanja daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan penelitian berdasarkan (Nurhidayah & Hendikawati, 2018), terdapat pengaruh langsung positif PAD dan DAK berpengaruh langsung positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU dan Belanja Pembangunan tidak berpengaruh langsung positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tidak terdapat pengaruh langsung positif pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Hasil sesuai dengan teori legitimasi

realisasi APBD terikat dengan implementasi yang dilakukan APBD, pada pemakaian anggaran tertera, agar sanggup menyampaikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan menaikkan produk maupun pelayanan yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat, dan sebagai akibat pelaksanaan amelalui rencana yang dilaksanakan (Saleh et al., 2021). serta kinerja APBD mencerminkan keinginan serta rencana kinerja Kabupaten Brebes dalam melaksanakan APBD, memberikan umpan balik dan tindak lanjut periode yang cukup baik karena APBD memiliki kinerja rata-rata 90% dengan standar yang sangat baik, dan memperoleh informasi komprehensif atas Laporan Realisasi APBD Kabupaten Brebes untuk memberikan dasar Laporan Realisasi APBD Kabupaten Brebus mencapai tujuan dan pertanggungjawaban. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan yang terus menerus menuju keadaan perekonomian yang lebih baik atau proses peningkatan kapasitas produktif perekonomian diwujudkan dengan peningkatan pendapatan nasional.(Lamaya & Mei, 2021). Dimana dengan adanya program yang terealisasi dari APBD mampu membuka ketenagaan kerja baru seperti terdapat perusahaan yang dibangun di Kabupaten Brebes dan adanya program pelatihan-pelatihan dari pemerintahan untuk menyalurkan masyarakatnya ke perusahaan tersebut, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat daerah.

2. Uji Statistika F (Simultan)

Tabel 12. Hasil Uji Statistia F (Simultan)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21,621	2	10,811	2,420	,292 ^b
	Residual	8,933	2	4,467		
	Total	30,555	4			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
b. Predictors: (Constant), Realisasi APBD, Rencana APBD

Sumber: Hasil penelitian, 2023

Pada table 12, uji statistika F (simultan) dapat dilihat nilai F sebesar 2,420, kemudian nilai signifikan sebesar 0,292. Dengan taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05, dengan uji 2 arah dan $dk=n-k-1$. Sehingga mendapatkan nilai dari data tersebut yaitu F hitung untuk Rencana dan realisasi APBD sebesar 10,13. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak dapat berpengaruh signifikan antara kedua variabel rencana dan realisasi APBD (X_1 dan X_2) terhadap Pertumbuhan (Y). Maka pada hasil tabel diatas bahwa F hitung menghasilkan $2,420 < 10,13$, sehingga tidak ada pengaruh signifikan secara simultan antar rencana dan realisasi (X_1 dan X_2) APBD terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (S. Reski, 2020), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan APBD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Soppeng. Dalam Peraturan Pemerintah No.1. Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Transformasi Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran disesuaikan dengan rencana dan realisasi APBD yang disusun atas kepentingan pelaksanaan serta kekuatan penerimaan, yang sama-sama tergantung menggunakan rencana dan realisasi anggaran (Firmalina et al., 2020). Namun pada kenyataannya rata-rata APBD yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana anggaran seperti adanya nilai yang bertambah atau berkurang antar rencana dan realisasi APBD seperti Kabupaten Brebes yang dapat dilihat dari kinerja APBD Kabupaten Brebes yang presentase hasil kinerja tidak ada yang 100% terealisasi, sehingga tidak mempengaruhi secara simultan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan kapasitas pada jangka panjang Kabupaten Brebes bersangkutan menyediakan berbagai barang dan jasa ekonomi penduduknya ditentukan

adanya kemajuan teknologi, *institutional* dan ideologis terhadap berbagai keadaan (Halim, 2020). Dalam penggunaan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan bertambahnya pendapatan masyarakat serta ketenagaan kerja masyarakat namun dalam sasaran masyarakat kurang tepat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 13. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,841 ^a	,708	,415	2,11347

a. Predictors: (Constant), Realisasi APBD, Rencana APBD

Sumber: Hasil penelitian, 2023

Jumlah keseluruhan variabel independen penelitian berjumlah dua, sehingga tidak perlu melihat *Adjusted R Square*. Dari table 4.12 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,415 sama dengan 41,5%. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh rencana APBD (X1) dan realisasi APBD (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Brebes sebesar 0,415 dari nilai tersebut bahwa nilai 0,415 dapat dikategorikan dalam moderat karena $> 0,33$.

KESIMPULAN

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rencana anggaran dan realisasi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2028 sampai dengan 2022. Dari penelitian ini mendapatkan hasil analisis data bahwa rencana anggaran dan realisasi secara parsial APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam rencana APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah untuk mensejahterahkan masyarakat yang dapat dilihat untuk menaksirkan pendapatan dan belanja daerah dilakukan secara akurat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta sebagai keberhasilan pembangunan daerah. Dan Realisasi anggaran menggambarkan pencapaian pelaksanaan APBD yang telah diharapkan dan direncanakan untuk memberikan *feedback* serta *follow up*, mendapatkan informasi menyeluruh tentang proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian diwujudkan bentuk kenaikan pendapatan, dimana dengan adanya program yang terealisasi dari APBD mampu membuka ketenagaan kerja baru, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat daerah. Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2018 sampai dengan 2022.

Berdasarkan uraian di atas dan saran yang diajukan diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Brebes mampu mempertahankan perencanaan dan mengalokasikan APBD sesuai dengan minimal sama atau lebih besar dalam aspek pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan pembangunan daerah menjadi lebih baik dari belanja tahun sebelumnya, bagi masyarakat diharapkan memberikan masukan dalam bentuk kritikan serta saran mendukung program pemerintah dari sisi keuangan dan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga mampu meningkatkan pendapatan, dan bagi peneliti sejenis diharapkan untuk memperbarui penelitian dengan menambahkan variabel penelitian, serta gunakan studi empiris yang lebih luas cakupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, M. B. (2018). *Pengaruh Anggaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat*. unismuh.ac.id. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2498-Full_Text.pdf
- Agustiwi, A., & Surakarta, U. (2022). Strategi Dan Management Pemerintah Daerah. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(2), 242–251.
- Ali, A. C., Adebani, W., Adesina, J. O., Aini, N., Budyanra, Adésinà, J. O., F, K. Ge., Adésinà, J. O., Omotoso, K. O., & Oyèwùmí, O. O. (2017). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Derah Kota Manado. *Journal of Modern African Studies*, 35(17), 2104.
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Ariyanti, K. (2020). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Dzaky Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 6(2), 218–226. <https://doi.org/10.35972/jieb.v6i2.349>
- Azifi, M. R., & Marliyah. (2022). *Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan*. 1(5), 729–736.
- Badan Keuangan Dan Aset Daerah. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020*. 2005, 1–34.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- BPS. (2022). *Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen), 2020-2022*. Juni 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html>
- BPS. (2023a). *Pengertian Pendapatan Nasional*. bps.go.id. <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>
- BPS. (2023b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha 2018-2022* (Badan Pusa). <https://doi.org/33296.2310>
- Casoni, C., Wulandari, H. K., Dumadi, D., & ... (2022). Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes Periode *Jurnal ...*, 6(3), 5515–5525.
- Efriza, & Tri Rachmanto Supena. (2021). Proses Politik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dki Jakarta Tahun 2015. *Jurnal Adhikari*, 1(1), 30–41. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i1.22>
- Fryda Lucyani, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2014-2018. *Journal information*, 10(3), 1–16.
- Ghozali, I. (2018). *Processing Data Penelitian Menggunakan SPSS* (P. K. dan P. A. IV (ed.); Bidang Kaj). lan.go.id.
- Hafizah, N. (2022). Peran Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Apbd Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 106–113. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1240>
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172.
- Hartandi, B. A. (2022). Ketepatan Waktu dalam Penetapan APBD oleh Kepala Daerah: Peran Siklus Politik. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan*

- Kebijakan Publik*, 7(3), 271–286. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i3.436>
- Hidayat, D., Sari, M., AR, F., & Azizah, K. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Valuta*, 7(1), 1–13.
- Hukum, S., Provinsi, P., & Selatan, S. (2019). *Struktur APBD Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. bpk.go.id.
- Ihalauw, F. Y., Elim, I., Kapojos, P. M., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2023). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 - 2020 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Masa Pandemi*. 6(2), 1271–1280.
- Indonesia, P. R. (2009). UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta, 2003*(1), 20–28.
- Iqbal, M., Rachman, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(April), 18–34.
- Lamaya, F., & Mei, N. N. (2021). Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Flores Timur. *Akuntansi*, 8(2), 43–49.
- Lova, P. Na. (2022). Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Akuntansi*, 8(2), 43–49.
- Majampoh, W. T., & Datu, C. (2021). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 1731–1741.
- Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 266–272.
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Sherly Pinatik. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset*, 9(2), 982–992.
- Nasution, M. D., & Harahap, J. P. R. (2020). Pengaruh Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Realisasi APBD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian, Vol. 5 No.*, 443–449.
- Nurhidayah, T., & Hendikawati, P. (2018). Pengaruh Realisasi APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dengan Statistical Mediation Analysis. *Jurnal Mipa Uns*, 41(1), 1–5.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 151. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*.
- Peraturan Pemerintah. (1999). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 1999(1), 1–5.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Akuntansi, 11(1), 1–10.

- Purba, B. (2020). Analisis Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2009 – 2018. *Jurnal Humaniora, 4(2)*, 244–255.
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020 *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 5(3), 2296–2313.
- Rahmawati, H. (2023). Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI Ekonomi, 31(02)*, 77–82. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.745>
- Rahmawati, R. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. *Jesya, 6(1)*, 794–803. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1019>
- Regina, T. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis, 11(1)*, 36–45. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.201>
- S. Reski. (2020). Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Soppeng. In *Universitas Muhammadiyah Makasar* (Vol. 21, Nomor 1).
- Safitri, D., Titi Rahmawati², Dumadi, Maftukhin, & Afridah, N. (2020). Pengaruh Jumlah UMKM dan Modal UMUM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN), 2(2)*, 62–72.
- Saleh, M., Khair, A., Sarkawi, S., & ... (2021). Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 7(1)*, 14–20.
- Salim, A., & Fadilla. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 7(1)*, 17–28.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Peran Audit Report Lag sebagai Variabel Mediasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit. *Jurnal Manajemen, 6(1)*, 25–34.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi. *Journal of Management, 13(3)*, 327–340.
- Tanjung, A. R., Rahmadani, S., & Putra, R. S. (2023). Implementasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Jakarta Pusat. *Jurnal Of Social Contemplativa, 1(1)*, 54–62.
- Ulfa, R. (2019). Variabel Dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Teknodik, 6115*, 196–215. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>
- Wance, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Buru Selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 5(1)*, 1–17. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1648>
- Yuliyah, P. L. R., & Ardini, L. (2022). Analisis Kinerja Pelaksanaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2016-2020. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 10(2)*, 118–128. <https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.6653>
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, 2(3)*, 169–176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>